



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : HENUGROHO PUJI PAMUNGKAS
- Jabatan** : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
- NHK** : 400258

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **731.850.000**

- Tanah dan Bangunan Seluas 181 m2/113 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 462.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 269.850.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **58.200.000**

- MOBIL, HONDA JAZZ 1.5 IDSI MT/GD3 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
- MOTOR, HONDA ACH1M21B04 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
- MOTOR, HONDA NF100 LD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **16.436.837**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **806.486.837**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **806.486.837**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.